

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. (2021). Efektifitas dan Manfaat Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.
- Adiwijaya, I. M. (2019). EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1979. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 5*.
- Afinotan, L. A. (2014). Decision Making in International Relations: A Theoretical Analysis. *Canadian Social Science Vol.10 No.5*.
- Alberto, Z. (2022). EKSTRADISI SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1979. *LEX ADMINISTRATUM*.
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Angkasari, W. (2014). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN EKSTRADISI TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DALAM KEPENTINGAN INDONESIA. *Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1*.
- Anjani, A. (2022). *Mengenal Perjanjian Ekstradisi yang Baru Disetujui RI dan Singapura*. detik.com.
- Arif, S. (2022). DAMPAK RATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA. *Lontar Merah Vol. 5 Nomor 1*.
- Arry Bainus, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Asri, T. (2019). DINAMIKA HUBUNGAN TIMOR LESTE – AUSTRALIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH CELAH TIMOR.
- Bassiouni, M. C. (2002). *Introduction to International Criminal Law Vol. II*.
- BBC. (2022). 'Buron koruptor' masih banyak di luar negeri: Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura 'membantu aparat mengejar tersangka'. bbc.com.
- BPHN. (2022). *HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA*. Retrieved from bphn.go.id: [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset\\_terkait\\_dengan\\_tindak\\_pidana\\_\(fix\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_(fix).pdf)

- BPHN. (2022). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN*. Retrieved from bphn.go.id: [https://bphn.go.id/data/documents/hasil\\_penyelarasan\\_na\\_ruu\\_tentang\\_eks\\_tradisi\\_ri-singapura.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/hasil_penyelarasan_na_ruu_tentang_eks_tradisi_ri-singapura.pdf)
- Candra, D. (2018). KENDALA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TRANSNASIONAL. *Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1*.
- CNN. (2021, Juli 16). *Bayar Denda Kasus, Adelin Lis Serahkan Rp1 M Plus Sertifikat*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715203746-12-668398/bayar-denda-kasus-adelin-lis-serahkan-rp1-m-plus-sertifikat>
- CNN. (2022). *Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura & Komitmen Seret Pulang Koruptor*. Jakarta: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126110810-12-751389/perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-komitmen-seret-pulang-koruptor>.
- Damarjati, D. (2022). *Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura hingga Terwujud di Era Jokowi*. Detik.com.
- Darul, C. (2016). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Darwis. (2018). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Transnational Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 8 No.2*.
- Darwis, N. (2018). EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN "TRANSNATIONAL CRIME". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 8 No.2*.
- Dedy, A. (2023). Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Detik.com. (2010). *Kronologi Lengkap Penangkapan Gayus di Singapura*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1329036/kronologi-lengkap-penangkapan-gayus-di-singapura>

- Dewi, N. (2020). Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Analogi Hukum*.
- DPR RI. (2022, Desember 15). *DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Ekstradisi Buronan Jadi UU*. Retrieved from [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id):  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42422/t/DPR%20dan%20Pemerintah%20Sahkan%20RUU%20Perjanjian%20Indonesia-Singapura%20tentang%20Ekstradisi%20Buronan%20Jadi%20UU>
- DPR RI. (2022, Desember 15). *DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Ekstradisi Buronan Jadi UU*. Retrieved from [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id):  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42422/t/DPR%20dan%20Pemerintah%20Sahkan%20RUU%20Perjanjian%20Indonesia-Singapura%20tentang%20Ekstradisi%20Buronan%20Jadi%20UU>
- Gunawan, C. (2022). *LEADERS RETREAT INDONESIA-SINGAPURA: Presiden Jokowi dan PM Lee Adakan Pertemuan di Bintang 25 Januari*. [gokepri.com](http://gokepri.com).
- Hartana, N. L. (2022). PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL (Kasus Kejahatan Lintas Negara) . *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA, Volume 3 Nomor 2*.
- Hasibuan, R. (2002). SUATU TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.
- Haswandi. (2015). PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. *Jurnal Litigasi*.
- Irfansyah, M. (2018). KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA. *Lex CrimenVol. VII/No. 7*.
- Jamillah, H. (2013). PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL.
- Joel, E. (2023). BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Jurnal Fakultas Hukum* .
- Jumroh, K. (2019). *Buku Pengembalian Aset Negara*. CV. Zigie Utama.
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* .

- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Kamil, I. (2022). *Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura*. Kompas.com.
- KEMENKO. (2023, januari 11). *UU 3/2023: Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan antara RI-Singapura*. Retrieved from jdih.maritim.go.id: <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>
- KEMENKUMHAM. (2022, Januari 25). *Ekstradisi RI-Singapura Bikin Gentar Koruptor dan Teroris, Ini Lini Masa hingga Perjanjian Ditandatangani Yasonna*. Retrieved from kemenkumham.go.id: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-singapura-bikin-gentar-koruptor-dan-teroris-ini-lini-masa-hingga-perjanjian-ditandatangani-yasonna>
- KEMENKUMHAM. (2022). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN*. Retrieved from bph.go.id: [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_pengesahan\\_dca\\_ri-singapura.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_pengesahan_dca_ri-singapura.pdf)
- KEMENKUMHAM. (2022). *Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana*. Retrieved from bphn.go.id: [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset\\_terkait\\_dengan\\_tindak\\_pidana\\_\(fix\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_(fix).pdf)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022). *hasil penyelarasan na ruu tentang ekstradisi ri-singapura*. Retrieved from bphn.go.id.
- KEMLU. (2019, April 07). *Kejahatan Lintas Negara*.
- Kompas.com. (2022, Januari 26). *Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/17280571/dari-pembunuhan-sampai-korupsi-ini-32-kejahatan-yang-pelakunya-bisa>
- Kompas.com. (2022, November 29). *Komisi I DPR Setujui RUU Perjanjian Singapura-RI tentang Kerja Sama Pertahanan*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/29/20091001/komisi-i-dpr-setujui-ruu-perjanjian-singapura-ri-tentang-kerja-sama?page=all>

- Kumar, P. (2007). *Singapore-Indonesia Extradition Treaty and Defence Cooperation*. ipcs.org.
- Lauterpacht, O. (1995). *International Law*. Eighth Edition by H. Lauterpacht, Q.C., LL.D., F.B.A. Vol. I—Peace. [London: Longmans, Green & Co.
- Luong, H. T. (2020). Transnational Crime and its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam. *IJCJ&SD* 9(2).
- Ma'rifah, A. (2021). PENANGANAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27, Nomor 8.
- Mahardika, C. (2020). ALASAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT STATUS INDONESIA DARI NEGARA BERKEMBANG MENJADI NEGARA MAJU TAHUN 2020.
- Mahayasa, R. (2012). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN PELARIAN KORUPTOR INDONESIA DI SINGAPURA.
- Maringka, S. (2018). *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Graffika Offset.
- Mathovani, S. A. (2021). PELAKSANAAN KERJASAMA EKSTRADISI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN HUKUM DI KAWASAN ASEAN.
- Meidiantama, R. (2022). PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Muhammadiyah Law Review* 6 (1).
- Mitchell, J. N. (2016). Transnational Organised Crime in Indonesia-The Need for International Cooperation. *Brawijaya Law Journal* V.3 n.2.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monique, P. (2020). Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Jurnal Transformasi Global*.
- Natarajan, M. (2019). *International and Transnational Crime and Justice*. United Kingdom: Cambridge University Press 2011,2019.
- Nazmi, N. (2023). URGENSITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA . *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*.

- Niko, N. (2020). FENOMENA DRUGS TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN JAGOI BABANG INDONESIA-MALAYSIA, KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 6 No.1* .
- Nirmalananda, D. M. (2020). Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Nuryani, D. (2022). REALISASI EKSTRADISI BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME SERTA PERAN IMIGRASI DALAM PELAKSANAANNYA. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*.
- Ompu, Z. (2013). KEJAHATAN NARKOBA SEBAGAI FENOMENA DARI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. *PRANATA HUKUM Volume 8 No 2*.
- Panjaitan, A. (2017). SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA SELATAN.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary Intenational Relations: Frameworks for understanding*. New York: Macmillan.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations*. Macmillan.
- Permata, N. A. (2021). URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-TIMOR LESTEDITINJAU BERDASARKAN KONVENSI WINA 1969.
- Permatasari, M. (2013). PEMBAHASAN DEFENCE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA -SINGAPURA OLEH DPR DAN PEMERINTAH INDONESIA DANIMPLIKASINYA BAGI TEORI BIROKRATIK POLITIK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Pricilla, M. (2019). URGENSI PENGAKUAN (RECOGNITION) DALAM MENJALIN KERJASAMA ANTAR NEGARA DI BIDANG EKSTRADISI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 12*.
- Prisgunanto, I. (2012). *Komunikasi dan Polisi*. C.V. Prisani Cendekia.
- Proboningsih, D. (2022). UPAYA PERWUJUDAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM LEDEARS RETREAT INDONESIA- SINGAPURA 2022. *PPEA INDONESIA*.
- Purba, E. F. (2012). *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan SADIA.

- Purna, R. (2023). *Kejahatan Narkoba Erat Kaitannya dengan Korupsi dan Terorisme*. Kompas.id.
- Putra, D. (2023). PENGARUH DEFENSE COOPERATION AGREEMENT INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS DI ASIA TENGGARA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTAHANAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Putranto, A. (2022, April 12). *Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu*. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all>
- putri, n. (2023). EKSTRADISI PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Putri, W. S. (2018). MPLEMENTASI PERJANJIAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG DALAM PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) MELALUI MEKANISME JOIN KREDIT (JCM).
- Reichel, P. (2014). *Transnational Crime and Justice*. Sage Publication, Inc.
- (2022, Januari 27). *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Menpan.go.id. Retrieved from Menpan.go.id.
- Rexton, P. (2016). *Drug Trafficking and International Security*. United States of America : Rowman and Littlefield.
- Reynold, S. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINTAS NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI (SUATU CATATAN MENARIK UNTUK DISKUSI). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Rizal, S. (2009). Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura ditinjau dari perspektif Ketahanan Nasional = Defence Cooperation Agreement.
- Roni. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Rumiyati, R. (2021). The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* .
- Sakinah, T. R. (2021). KEPENTINGAN NASIONAL SINGAPURA DI BALIK KESEPAKATAN PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN INDONESIA.

- Sandityo, H. (2011). Tinjauan Hukum atas Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama Sister City/Sister Province).
- Sanur, R. (2014). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIVIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2008-2012. *Jurnal Online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Sapta, I. (2022). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Schwarzenberger, G. (1957). *International Law*. London: Vol. 1 (3rd ed.) : International Law As Applied by International Courts and Tribunals. I. London: Stevens and Sons Ltd.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, Januari 25 ). *Pernyataan Pers Bersama Presiden RI dan Perdana Menteri Singapura*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-bersama-presiden-ri-dan-perdana-menteri-singapura/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, Januari 26). *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Retrieved from Setkab.go.id: <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/>
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (2022, Januari 25). *Menkumham Tandatangan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Retrieved from Setnasasean.id: <https://setnasasean.id/news/read/menkumham-tandatangan-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>
- Septiadi, B. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Septiana, N. (2019). KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA . *Jurnal Trisakti*.
- Setyadi, Y. (2022). TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS NUSAKAMBANGAN). *Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 1 No. 2*.



- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Suci, L. (2021). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIMEDI ERA GLOBALISASI DENGAN PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN PHILIPINA. *Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1*.
- Sugandi. (2021). *KPK Mengaku Kesulitan Tangkap Buronan Korupsi di Singapura*. Realitarkyat.com.
- Sugiarto. (2001). *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sujana, N. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sunarso, S. (2009). *Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana : Instrumen penegakan hukum pidana internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyatna. (2014). Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Kemanan Negara. *Jurnal Yuridis Vol 1 No 2*.
- Sutia, A. (2020). KORUPSI SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME: PALERMO CONVENTION. *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 10* .
- Tabiu, R. (2023). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi*. (n.d.). Retrieved from portal.ahu.go.id.
- Walidin, W. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Wanimbo, K. (2022). PENGARUH KONFLIK KEBIJAKAN LUAR NEGERI QATAR TERHADAP PUTUSAN DIPLOMATIK DENGAN ARAB SAUDI 2016-2017.
- Wicaksana, A. S. (2016). PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014 (STUDI KASUS: KORUPSI BLBI). *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4*.
- Yunita, K. (2023, November 21). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Singapura Kian Kuat*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/21/diplomasi-pertahanan-indonesia-dengan-singapura-kian-kuat>

Yunus, N. R. (2023). implication of State Sovereignty for The Ratification of International Law. *Journal of Islamic and International Affairs*.